

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Penerangan Indonesia tahun 1969 menyebutkan, para wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan pemerintah. Hingga juni 1998 hanya satu organisasi, Persatuan Wartawan Indonesia yang diakui. Organisasi PWI sangat ketat diatur pemerintah, pemimpinnya seringkali pensiunan militer maupun yang masih aktif, atau fungsionaris Golkar.¹ Setelah memasuki era Orde Baru, berdasarkan peraturan Menteri Penerangan tahun 1969 (No. 02/PER/MENPEN/1969, bab 1 pasal 3), semua jurnalis alias wartawan di seluruh Indonesia haruslah menjadi anggota PWI. Di masa itu, menurut David T. Hill “satu-satunya organisasi (para jurnalis) yang sah di mata pemerintah adalah PWI”.²

Pers dalam menyajikan bahan siarannya atau tulisan-tulisannya selalu menempatkan kepentingan Nasional dalam keadaan bagaimanapun di atas kepentingan pribadi dan golongannya, demikian juga selalu menghindari penyebaran secara terbuka atau terselubung ajaran komunisme. Dalam kerangka memainkan peranan dan fungsi strategis itu maka wartawan Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia

¹ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*. (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) hal. 73

²Petrik Matanasi, *Saat Tan Malaka Hadir di Kongres PWI*, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/saat-tan-malaka-hadir-di-kongres-pwi-ciBJ>, Sabtu 4 Januari 2020 15.40

(PWI), mengikatkan diri dengan ideologi/falsafah Bangsa Pancasila (pembukaan UUD 1945), UUD 1945, Undang-Undang Pokok Pers, Kode Etik Jurnalistik, GBHN dan tata nilai yang berlaku di tengah masyarakat sebagai rambu-rambu Pers Nasional.³

Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden No. 5 tanggal 23 Januari 1985 menetapkan pada tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Hal ini berkaitan dengan sejarah perjuangan pers di Indonesia. Dalam hubungan ini, ditinjau dari satu sisi faktor pendidikan wartawan menjadi amat utama, atau seringkali disebut strategis. Disamping itu tentulah tingkat apresiasi dan dukungan masyarakat terhadap pers nasionalnya besar pengaruhnya dan ikut menentukan pula.⁴

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terbentuk di Sumatera Barat pada tahun 1965. Tidak ada tanggal pastinya karena tidak ada arsip tertulis tentang tanggal terbentuknya PWI di Sumatera Barat. Namun para anggota PWI Sumatera Barat sepakat menjadikan tanggal terbentuknya PWI Sumatera Barat sama dengan Hari Pers Nasional yaitu pada tanggal 9 Februari dan PWI Sumatera Barat pertama kali diketuai oleh Wardjono yang menjabat pada tahun 1965-1968.⁵

Pada masa Orde Baru banyak diantara para anggota PWI yang ikut serta dalam dunia politik. Diantaranya ada Nasrul Siddik yang merupakan anggota PWI

³Drs. Yanuar Abdullah, *Dasar-Dasar Kewartawanan (Teori dan Praktek)*, Angkasa Raya, hal. 15

⁴Tribuana Said, *H. Rosihan Anwar Wartawan dengan Aneka Citra*, (Jakarta, Harian Kompas, 1992) hal. 50

⁵ Wawancara dengan *Heranof Firdaus*. 10 Agustus 2020 di kantor PWI Sumatera Barat

Sumatera Barat dan juga ketua PWI Sumatera Barat yang kedua.⁶ Nasrul Siddik adalah orang pertama dari keluarga pers yang diberi kursi menjadi anggota DPRD Sumatera Barat melalui Fraksi Karya Pembangunan (Golkar). Selain itu ketua PWI pertama Zuiyen Rais juga pernah terjun ke dalam dunia politik yaitu menjabat sebagai walikota Padang pada periode 1993-1998 dan 1998-2003, Zuiyen Rais merupakan wartawan pertama di Indonesia yg menjadi walikota.⁷

Seperti yang sudah dibahas di Latar Belakang, Pada masa Orde Baru PWI Sumatera Barat banyak melakukan aktivitas untuk kesejahteraan anggotanya dan juga untuk masyarakat Sumatra Barat seperti ikut andil dalam pemilihan anggota DPRD, maka dari itu skripsi ini dibuat untuk menjelaskan secara rinci apa saja peranan dan aktivitas yang dilakukan oleh PWI Sumatera Barat pada masa Orde Baru.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Kajian ini akan fokus pada masalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat dan kaitannya dengan masa Orde Baru. Penelitian ini akan menjelaskan sejarah Organisasi PWI di Sumatera Barat dan peranannya di Sumatera Barat serta aktivitas yang dilakukan PWI Sumatera Barat pada masa Orde Baru, Berikut untuk lebih mempertajam permasalahan maka diiringi beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya PWI di Indonesia dan Sumatera Barat?
2. Kenapa PWI menjadi satu satunya organisasi wartawan yang diizinkan pada masa Orde Baru?

⁶Wawancara dengan *Heranof Firdaus*. 10 Agustus 2020 di kantor PWI Sumatera Barat

⁷ Abrar Yusra dkk, *Wartawan Berintegritas Bung Nasrul Siddik*, (Jakarta: Teras,2016)

3. Sejauh manakah aktivitas dan peranan PWI Sumatera Barat pada masa Orde Baru?

Batasan temporal penelitian ini adalah dari tahun 1968 sampai tahun 1999 dan batasan spasialnya adalah provinsi Sumatera Barat. Batasan temporal yang dipilih menjadi batasan awal adalah tahun 1968 karena tahun itu merupakan masa awal kepemimpinan Zuiyen Rais di PWI Sumatera Barat dan di tahun 1999 menjadi acuan dari batasan akhir penelitian ini dikarenakan pada tahun itu berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia dan telah diperhatikannya keberadaan pers (wartawan) di Indonesia yaitu sudah dibuatnya *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers* yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara Pers di Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguraikan bagaimana sejarah Organisasi PWI berdiri di Indonesia dan Sumatera Barat.
2. Menjelaskan alasan mengapa hanya organisasi PWI yang diizinkan beroperasi di masa Orde Baru.
3. Mengetahui aktivitas dan peranan PWI Sumatera Barat pada masa Orde Baru di Sumatera Barat

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat pada masa Orde Baru. Dan juga diharapkan hasil penelitian skripsi ini menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun kajian literatur yang dalamnya membahas tentang PWI Sumatera Barat pada masa Orde Baru antara lain:

kajian yang relevan dalam penelitian ini yang pertama adalah H. Sofyan Lubis telah menerbitkan satu buku yang berhubungan dengan organisasi PWI Nasional yang berjudul *Dalam Kemelut Pers Orde Baru*⁸. Buku ini banyak menceritakan perjalanan H. Sofyan Lubis selama menjadi Wartawan dan juga menceritakan bagaimana perjalanan organisasi PWI pada masa Orde Baru, mulai dari konflik pada saat pemilihan ketua umum yang menjadikan PWI pusat terbelah dua yaitu antara kubu B.M Diah dan kubu Rosihan Anwar. Selain itu buku ini juga banyak bercerita tentang Kongres-Kongres yang diadakan PWI Pusat di seluruh Indonesia, dan tentang Bagaimana Pers di Indonesia pernah di Bredel oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Di buku ini juga menceritakan bagaimana para wartawan terkhususnya anggota PWI berdebat yang menghasilkan Undang-Undang yang memerdekakan pers yaitu UU nomor 40 tahun 1999. Yang membedakan dengan penulisan yang akan disusun oleh

⁸H. Sofyan Lubis, *Dalam Kemelut Pers Orde Baru;Kisah hidup H. Sofyan Lubis*,(Jakarta; PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2017)

penulis adalah cakupan penulisan penyusun lebih membahas tentang PWI Sumatera Barat dan lebih fokus kepada tokoh-tokoh pers di Sumatera Barat.

Buku yang berjudul *Pembredelan Pers di Indonesia Kasus Koran Indonesia Raya* karya Ignatius Haryanto. Buku ini membahas tentang bagaimana kehidupan pers pada masa Orde Baru dan hubungannya dengan pemerintah melalui kasus pembredelan yang terjadi pada koran Indonesia Raya milik Mochtar Lubis, hal itu dikarenakan Indonesia Raya disebut sebagai surat kabar yang kontroversial karena cara penyajian beritanya dengan kritik-kritik yang tajam dan langsung. Yang membedakan dengan penulisan yang akan disusun oleh penulis adalah penulis hanya menyinggung pers di Sumatera Barat dan sedikit mengambil contoh bagaimana hubungan pers dan pemerintah di Indonesia lewat buku tersebut.

Buku yang berjudul *H. Rosihan Anwar Wartawan dengan Aneka Citra*⁹ dikarang oleh teman-teman sesama wartawan H. Rosihan Anwar, salah satunya wartawan yang memiliki garis keturunan Minangkabau yaitu Tribuana Said. Buku ini berisi tentang perjalanan seorang tokoh wartawan yaitu Haji Rosihan Anwar, ia giat di organisasi PWI dan pernah pula menjadi ketua PWI Pusat, ketua dewan kehormatan PWI, penasehat PWI dan bahkan direktur program Karya Latihan Wartawan. Dan juga buku ini sedikit bercerita perjalanan pers dan organisasi PWI di Indonesia. Yang membedakan dengan penulisan yang akan disusun oleh penulis

⁹Tribuana Said, *H. Rosihan Anwar Wartawan dengan Aneka Citra*, (Jakarta, Harian Kompas, 1992)

adalah cakupan penulisan penyusun menulis tentang PWI Sumatera Barat dan sedikit membahas tentang PWI Pusat.

Nasrul Siddik merupakan salah satu tokoh legendaris dari PWI Sumatera Barat, beliau pernah menjabat sebagai ketua umum PWI Sumatera Barat pada periode 1968-1971. Maka dari itu Abrar Yusra, Mursjid AM, M. Nazief E. Siddik, dan Azizah Etek menulis sebuah buku yang berjudul *Wartawan Berintegritas Bung Nasrul Siddik*¹⁰. Buku ini membahas bagaimana Nasrul Siddik dimata para sahabatnya yang juga merupakan rekan sesama wartawan. Nasrul Siddik juga memiliki andil besar dalam PWI Sumatera Barat pada masa Orde Baru. Yang membedakan dengan penulisan yang akan disusun oleh penulis adalah cakupan penulisan penyusun tidak hanya fokus pada tokoh Nasrul Siddik namun juga pada tokoh tokoh PWI Sumatera Barat lainnya.

Buku karangan Hasril Chaniago yang berjudul *121 Wartawan Hebat dari Ranah Minang & Sejumlah Jubir Rumah Bagonjong*¹¹ menceritakan tentang profil-profil sejumlah tokoh pers, wartawan, dan Humas hebat yang pernah dilahirkan atau berasal dari Sumatera Barat. Banyak diantaranya yang merupakan anggota PWI Sumatera Barat yang bertugas pada masa pemerintahan Orde Baru diantaranya adalah Nasrul Siddik, H. Rosihan Anwar, Chairul Harun, Basril Djabar dan masih banyak lagi. Yang membedakan dengan penulisan yang akan disusun oleh penulis adalah cakupan penulisan penyusun tidak hanya menulis tentang wartawan di Sumatera

¹⁰Abrar Yusra dkk, *Wartawan Berintegritas Bung Nasrul Siddik*, (Jakarta: Teras, 2016)

¹¹Hasril Caniago, *121 Wartawan Hebat dari Ranah Minang & Sejumlah Jubir Rumah Bagonjong*, (Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat, 2018)

Barat namun juga membahas tentang organisasi dari wartawan pada masa Orde Baru yaitu PWI Sumatera Barat.

Buku yang berjudul *101 Orang Minang di Pentas Sejarah*, buku ini berisikan tentang biografi-biografi singkat dari tokoh-tokoh legendaris yang berasal dari Sumatera Barat yang namanya sudah harum di pentas sejarah Indonesia, salah satunya yaitu Adinegoro yang merupakan perintis Pers di Indonesia dan juga di juluki sebagai “Bapak Wartawan Indonesia”. selain Adinegoro, ada juga tokoh terkenal lainnya seperti Buya Hamka, Rohana Kuddus, Haji Agus Salim dll. Yang membedakan dengan penulisan yang akan disusun oleh penulis adalah cakupan penulisan penyusun hanya membahas beberapa orang minang di pentas sejarah yang memiliki riwayat menjadi wartawan.

Buku yang berjudul *Hasan Basri Durin (Sebuah Otobiografi)*, buku menceritakan tentang riwayat hidup Hasan Basri yang ditulisnya sendiri. Dimulai dari riwayat pendidikan, awal karirnya menjadi pejabat Wali Kota Padang, kemudian menjadi Wali kota Padang selama 2 periode tahun 1973-1983 hingga menjadi Gubernur Sumatera Barat selama 2 periode tahun 1987-1997. Yang membedakan dengan penulisan yang akan disusun oleh penulis adalah cakupan penulisan penyusun hanya membahas keterkaitan PWI Sumatera Barat pada saat PEMILU Sumatera Barat pada periode 1973-1983 yang saat itu Hasan Basri ikut mencalonkan diri sebagai walikota Padang.

Selain buku, kajian yang relevan dengan skripsi ini adalah jurnal yang berjudul “PWI di Kota Jambi tahun 1963-1974” yang ditulis oleh Rohmo Reiyanto. Jurnal ini berisi tentang bagaimana sejarah terbentuknya PWI di Kota Jambi dan peranan PWI dalam memberikan pelayanan media massa untuk informasi publik. yang membedakan dengan penulisan yang akan disusun penulis adalah penulis akan membahas tentang sejarah dan perkembangan PWI namun di lingkup Sumatera Barat.

Jurnal yang berjudul “Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media dalam Pemilu 2004”¹² yang ditulis oleh Masduki. Jurnal ini berisi tentang bagaimana jurnalisme dan politik itu satu kesatuan yang saling berhubungan, dan jurnalisme memiliki peran penting dalam perjalanan politik di Indonesia. Yang membedakan dengan penulisan yang akan disusun oleh penulis adalah cakupan penulisan penyusun hubungan antara PWI Sumatera Barat dengan Politik pada masa Orde Bru.

Dari studi-studi yang ada diatas, telah banyak penulisan mengenai pers, organisasi Persatuan Wartawan Indonesia dan politik pada masa Orde Baru. Dalam karya diatas belum ada yang mengkaji tentang Hubungan dan Peran PWI Sumatera Barat pada masa Orde Baru secara khusus.

E. Kerangka Analisis

Kajian ini didekati dari perspektif sejarah sosial, menurut Kuntowijoyo Sejarah sosial adalah penulisan sejarah yang menempatkan masyarakat sebagai bahan

¹²Masduki, *Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media dalam Pemilu 2004* (jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8 Nomor 1, Juli 2004)

kajian. Penulisan sejarah sosial memerlukan usaha untuk membuat kerangka utuh mengenai masyarakat secara keseluruhan. Penelitian dan penulisan sejarah sosial memerlukan strategi berupa model yang berfungsi sebagai inspirasi heuristik dalam pencarian, pengumpulan dan penyusunan. Maka diperlukan tinjauan analisis yang berhubungan dengan penelitian, untuk itu penulis menjabarkannya sebagai berikut:

Kerja sama antara dua orang atau lebih boleh jadi dianggap sebagai upaya yang bersifat natural. Selain sebagai makhluk- individu, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial (*social being*). Manusia, menurut pandangan ini, tidak bisa melepaskan ketergantungannya pada orang lain. Namun, harus diakui pula munculnya kerja sama tersebut tidak terjadi semata-mata bersifat alamiah, tetapi karena keterbatasan masing-masing individu. Oleh sebab itu, kerja sama antara dua orang atau lebih sesungguhnya bertujuan agar di antara mereka bisa saling membantu untuk mencapai tujuan (baca: memenuhi kebutuhan) meski tujuan mereka bukan tidak mungkin berbeda. Gambaran ini menunjukkan bahwa perbedaan tujuan sesungguhnya tidak menghalangi mereka menjalin kerja sama selama mereka bisa memenuhi kebutuhan dan tujuan masing-masing. Jika katakanlah ikatan kerja sama ini dianggap efektif, sangat boleh jadi bentuk kerja sama yang semula bersifat temporer kemudian diatur dengan pola kegiatan yang lebih tersistem, terstruktur, dan masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran yang terlebih dahulu mereka sepakati. Pola kerja sama semacam ini sering disebut sebagai organisasi.¹³

¹³Achmad Sobirin, *Organisasi dan perilaku Organisasi* (Universitas Terbuka, 2015) hal 2

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan juga bisa diartikan, salah satu profesi yang dituntut untuk mengungkapkan kebenaran dan menginformasikan ke publik seluas mungkin temuan-temuan dari fakta-fakta yang berhasil digalinya, apa adanya, tanpa rekayasa, dan tanpa tujuan-tujuan subjektif tertentu, selain semata-mata demi pembangunan kehidupan dan peradaban kemanusiaan yang lebih baik. Dalam hal ini, wartawan harus benar-benar mampu bergulat dalam dunia Jurnalistik.¹⁴

Keberadaan organisasi wartawan antara lain untuk mengembangkan kemerdekaan pers seutuhnya, dimana wartawan professional yang dalam tugasnya bekerja dengan bebas namun bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat untuk mendirikan Organisasi Wartawan adalah memiliki anggota dengan jumlah minimal 500 wartawan dari seluruh cabang. Hal lain, organisasi ini memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Jika organisasi wartawan ini sudah terbentuk, harus didaftarkan ke Dewan Pers dan bersedia untuk dilakukan verifikasi oleh Dewan Pers.¹⁵

Pada masa Revolusi, pers Indonesia diterbitkan baik di daerah yang diduduki Belanda maupun daerah yang dikuasai Republik. Di daerah yang di duduki Belanda, pers Indonesia di sensor sangat keras; bahkan di daerah Republik sendiri, surat-surat kabar Indonesia kadang-kadang ditutup. Meskipun banyak cobaan yang dihadapi pada awal sejarahnya, atau justru karena cobaan itulah, pers dapat bertahan sebagai sistem

¹⁴*Ibid* hal 29

¹⁵ War Djamil, *Organisasi Wartawan*, <https://analisdaily.com/berita/arsip/2018/7/30/593742/organisasi-wartawan/>, diakses pada Jumat, 25 Desember 2020 pukul 18.54

komunikasi. Pers Belanda, Cina, dan Pers Pribumi Indonesia, yang melintasi lingkungan bahasa dan kebudayaan satu sama lain, dan yang tetap dapat bertahan meskipun terdapat sensor dan undang-undang yang melarang mengkritik pemerintah, ternyata bisa hidup terus di pasaran yang terbatas.¹⁶

Dalam perjalanan sejarah kepemimpinan di Indonesia, pernah berlaku masa kepemimpinan yang dinamakan dengan era Orde Baru dan “dikuasai” oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Pada era ini, kekuatan politik ada ditangan presiden dengan militer dan Golongan Karya (Golkar) di sampingnya. Presiden Soeharto berhasil menempatkan dirinya sebagai “orang nomor satu” di Indonesia dengan kekuasaan yang sangat besar. Di puncak kekuasaannya itu, Soeharto memperlihatkan kecenderungan tingkah laku politik yang otoriter. Bahkan Soeharto memegang kendali terhadap partai politik dengan mengerucutkan dan menggabungkan jumlah partai yang semula banyak menjadi hanya 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Krisna Harahap, 2000:23).¹⁷

Kajian mengenai sejarah PWI akan terkait dengan Undang-Undang Pers dan politik masa Orde Baru. kebijakan pers (kebebasan pers) di Indonesia selalu mengalami pasang surut, tergantung penguasa politik pada saat itu. Artinya, semakin otoriter sebuah rezim penguasa maka semakin konservatif kebijakannya. Demikian sebaliknya, semakin demokratis sebuah rezim penguasa maka semakin

¹⁶ Edward Cecil Smith, *Pembreidelan Pers di Indonesia*, (PT Pustaka Grafitipers, Jakarta 1986) hal. 3

¹⁷Budi Juliardi, *Pers di Sumatera Barat Era Orde Baru dan Era Reformasi*, (STKIP PGRI Sumatera Barat, 2012) hal 2

otonom kebijakan persnya. Pada tahun 1990-an, di tengah gairah pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ekspansi industri media, prospek kebebasan pers di Indonesia justru tampak semakin tenggelam. Harapan yang dimunculkan oleh presiden Soeharto melalui pidato kenegaraannya, Agustus 1990, yang menyerukan agar masyarakat tidak perlu takut untuk menyatakan pandangan yang berbeda. Namun dalam praktiknya dengan cepat ditenggelamkan kembali oleh peristiwa pembredelan majalah *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* tahun 1994.¹⁸

Pers sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memegang peranan penting dalam berjalannya kehidupan bernegara. Pers berperan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggaraan negara, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang telah mereka mandatkan pada para penyelenggara negara.¹⁹

berdasarkan hal diatas, organisasi wartawan dan demokrasi pers politik pada masa Orde Baru tumbuh bersama-sama. Wartawan atau pers dengan politik merupakan satu kesatuan yg terikat sehingga mereka memiliki peranan yang signifikan di dunia politik terutama pada masa Orde Baru.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan

¹⁸*Ibid* hal 4

¹⁹Yosef Bujana Adi, Skripsi *Kebebasan Pers Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal. 11

historiografi. Tahap pertama yaitu heuristik atau pengumpulan sumber tertulis, pada tahap ini sumber-sumber yang dicari adalah sumber primer dan sekunder.

Dalam tahap heuristik, kegiatan pengumpulan sumber tertulis primer maupun sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sumber primer yang didapatkan penulis adalah berupa buku karya PWI Sumatera Barat dan Koran-koran Sumatera Barat terbitan masa Orde Baru. Selain itu ada juga sumber primer lainnya dengan penelusuran terhadap arsip-arsip yang dimiliki PWI Sumatera Barat seperti buku putih PWI Sumatera Barat, dan Arsip foto ketua-ketua PWI Sumatera Barat. Lalu dilakukan juga serangkaian wawancara untuk mendukung penulisan skripsi dan penguat data penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan terhadap mantan ketua PWI Sumatera Barat yaitu Basril Basyar, MM dan H. Heranof Firdaus. Untuk sumber sekunder dengan melakukan studi pustaka ke berbagai perpustakaan seperti Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan kantor Arsip kota Padang. Buku dan arsip yang didapatkan antara lain Buku Putih PWI Sumatera Barat, Koran *Haluan* pada tahun 1993, 1994 dan 1997, Koran *Singgalang* tahun 1991 dan 1997, buku *121 Wartawan Hebat dari Ranah Minang & Sejumlah Jubir Rumah Bagonjong, 101 Orang Minang di Pentas Sejarah, Jejak Langkah Wartawan Senior, 55 Tokoh Indonesia Asal Minangkabau, Siapa Mengapa Sejumlah Orang Minang, Wartawan Berintegritas*

Bung Nasrul Siddik. Dengan digunakannya sumber sekunder, tambahan dapat yang didapatkan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *kritik sumber* yang didapatkan dengan dua cara, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah kritik secara fisik dari data-data yang didapatkan sebagai sumber penulisan. Sedangkan kritik intern adalah penilaian terhadap isi dari data-data yang diperoleh untuk mendapatkan fakta-fakta terkait topik penelitian.

Selanjutnya, dalam penelitian ini dilakukan *interpretasi* atau penafsiran data-data yang diperoleh setelah dilakukan kritik sumber. Adapun langkah terakhir dalam penelitian ini adalah dengan merekonstruksi hasil interpretasi menjadi sebuah tulisan sejarah.

Tahap Keempat *Historiografi*, ini adalah tahap akhir dari penelitian yaitu penulisan sejarah. Penelitian ditulis berdasarkan fakta-fakta didalam sumber yang sudah di interpretasikan. Setelah melakukan proses analisis proses kerja mencapai tahap akhir yaitu penulisan sejarah. Proses penulisan dilakukan agar fakta-fakta yang sebelumnya terlepas satu sama lain dapat disatukan sehingga perpaduan antara logis dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian adalah berupa skripsi yang terbagi dalam empat bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi uraian tentang perkembangan Organisasi Wartawan di Indonesia, dimulai pada sebelum masa Orde Baru, sesudah Orde Baru serta latar belakang berdirinya PWI di Sumatera Barat.

Bab ketiga menjelaskan tentang bagaimana organisasi PWI Sumatera Barat pada masa Orde Baru tahun 1968-1999, yang nantinya bab ini menjabarkan peranan organisasi PWI mulai dari Internal, di Sumatera Barat hingga peranan PWI Sumatera Barat dalam Politik pada masa Orde Baru.

Bab keempat menjabarkan profil dari tokoh-tokoh PWI yang cukup berpengaruh di dalam organisasi PWI Sumatera Barat mulai dari Zuiyen Rais, Nasrul Siddik dan lain-lain.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dai penelitian ini. Selain itu, bagian ini berisi jawaban pokok yang muncul dalam rumusan masalah dan pokok-pokok analisa yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

